

Hubungan Agama dan Negara dalam perspektif Aksi Bela Islam

Yogi Supriadi

(Mahasiswa Religious Studies Program Pasca Sarjana
UIN Bandung Bandung/e-mail: yogi_s@yahoo.com)

Abstrak

Di Negara kita, karena agama seolah dipisahkan dari Negara. Agama dipakai Negara sebagai simbol. Tidak heran, jika nilai kesalehan para pemimpin (pejabat) tidak tampak mengatur tata kelola pemerintahan. Sehingga timbul ketimpangan politik dan kesenjangan ekonomi, keadilan sosial menjadi sesuatu yang sulit ditemukan.

Negara kita tidak memilih berasaskan Agama, tetapi cenderung sekuler (memisahkan Agama dengan Negara), pertimbangannya jika berasaskan salah satu Agama, maka kemudian mana kerukunan dan persatuan (kebhinekaan) tidak akan pernah tercipta. Dan ketentraman negara pun mungkin akan terganggu, dan yang terjadi jika Negara terlalu mencampuri urusan Agama begitupun sebaliknya maka tidak heran satu sama lain akan saling intervensi dan saling bersebrangan.

Isu agama selalu kalah dengan *issue–issue* lainnya di negeri kita. Tetapi pasca terjadinya Aksi Bela Islam, isu agama dalam sebuah pergerakan kembali diperhitungkan seolah menenggelamkan stigma yang berpandangan agama sumber Teroris. Dan Negara dibuat repot. Presiden sebagai kepala tertinggi negara/pemerintahan langsung melakukan safari ke setiap Ormas Islam dan para Tokoh Islam yang ada di Indonesia.

Namun Negara belum bisa disebut terbuka mendengarkan aspirasi umat Islam. Bahkan seolah dibuat konflik antara satu pemahaman dan pemahaman yang lainnya, dari satu Ormas dengan Ormas yang lainnya sebagai sebuah konflik yang di pelihara oleh Negara. Pasca Aksi Bela Islam, tidak sedikit tokoh Islam dianggap sebagai dalang makar dengan dalih agama. Maka yang terjadi adalah peng-Kriminalisasian para tokoh Ormas tersebut.

Aksi Bela Islam memberi pelajaran kepada kita, perlunya rumusan relasi Agama dan Negara serta Pancasila sebagai pemersatu diperjelas dalam perilaku pemimpin bangsa ini. Juga memberikan makna bahwa Aksi Bela Islam menunjukkan sikap modernis Umat Islam mengkritisi sikap yang membahayakan persatuan dan kesatuan terkait isu keagamaan, yang kebetulan berimpitan dengan persoalan politik.

Kata Kunci :

Agama, Negara, Aksi Bela Islam, Sekuler, Demokrasi, Modernis, Sekularisme

Abstract

In our country, because religion seems to be separated from the State. Religion is used by the State as a symbol. Not surprisingly, if the value of the piety of leaders (officials) does not seem to govern governance. As a result of political inequality and economic disparities, social justice becomes something that is hard to find.

Our country does not choose based on Religion, but tend to be secular (separating Religion with the State), its consideration if based on one Religion, then where the harmony and unity (diversity) will never be created. And the tranquility of the state may be disturbed, and what happens if the State too interfere in the affairs of religion as well as vice versa then no wonder each other will mutually intervene and cross each other.

The issue of religion is always inferior to other issues in our country. But after the occurrence of Islamic Defense, the issue of religion in a movement back is calculated as if drowning the stigma of a religious view of Terrorist sources. And the State made trouble. The President as the supreme head of state / government directly conducted a safari to every Islamic Society and the Islamic figures in Indonesia.

But the State can not be called open to listen to the aspirations of Muslims. Even as if created a conflict between one understanding and another understanding, from one mass organization to another as a conflict maintained by the State. Post-Action Bela Islam, not a few Islamic leaders are considered as a mastermind behind the assumption of religion. So what happens is the Criminalization of the leaders of these organizations.

The Islamic Defense Action teaches us, the need for the formulation of Religion and State relations and Pancasila as unifier is clarified in the behavior of this nation's leader. It also implies that the Islamic Defense Action shows a modernist attitude. Muslims criticize attitudes that endanger the unity and unity of religious issues, which coincide with political issues

Keyword

Religion, State, Islamic Defense, Secular, Democracy, Modernist, Secularism

A. PENDAHULUAN

Agama dan issue Kontemporer

Agama, akhir-akhir ini term agama menjadi *issue* yang menarik untuk diperbincangkan baik agama sebagai pemahaman maupun agama sebagai politik. Media massa –baik cetak maupun elektronik—*issue* agama menjadi *trending topic*. Apalagi terjadinya Demonstrasi gelar Bela Islam yang diprakarsai oleh lembaga tertinggi salah satu agama besar di Indonesia yakni MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan GNPF-MUI.

Demonstrasi besar-besaran berlangsung pada 4 Nopember 2016. Penggeraknya menamakan diri Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GN- PF-

MUI). Demonstran menuntut agar aparat hukum segera memproses kasus pidana penistaan agama, yang menuntut fatwa MUI bertanggal 11 Oktober 2016 atas perkara yang telah dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok⁶⁶. Jutaan Orang tergerak hatinya dan Ratusan ribu orang turun ke jalan yang berpusat di daerah DKI Jakarta. Tak cuma ulama dan umat kebanyakan, semua elemen masyarakat ikut tergerak hatinya mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas.

⁶⁶Dede Mulyanto, *Bela Islam atau Bela Oligarki : Pertalian Agama, Politik dan Kapitalisme di Indonesia*, (Pustaka Indoprogres, 2017), sebuah pengantar.

Melihat dari fenomena itu, *issue* agama menjadi sangat seksi untuk diperbincangkan, bahkan menjadi sebuah hal yang sangat menakutkan jika dipelesetkan di bangsa tercinta ini. Agama menjadi sebuah ke-melekatan dalam diri setiap individu. Bahkan agama sangat dipandang sebuah jati diri tersendiri, terbukti dengan adanya Kolom Agama di Kartu Tanda Penduduk. Arti dari Agama sendiri menurut KBBI adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta lingkungannya.⁶⁷ Maka terlihat jelas arti dari Agama adalah semacam aturan yang beraspek kesalihan sosial. Namun apabila sebuah agama yang bersifat individu dan yang ditinggikan hanya segelintir manusia kemudian dilegitimasi oleh sebuah kelompok dan akhirnya menjadi sebuah peng-klaiman kebenaran dan memaksa kepada setiap orang untuk memaksakan sebuah ajaran tertentu, maka tentu saja ini menjadi sebuah ancaman tersendiri.

Namun jika dilihat dari kejadian Aksi bela Islam yang terjadi tahun 2016 hingga awal tahun 2017 kemarin inimenunjukkan sikap kebersamaan muncul dan semangat yang diusung seolah satu, tanpa sekte, tanpa perbedaan.

Sebagian kaum Nasionalis mengatakan jika aksi Bela Islam adalah simbol kebangkitan Islam di Indonesia, dan ini terbukti dengan mulai merebaknya berbagai kasus yang ditujukan kepada para

pemimpin dalam pergerakan Bela Islam tersebut.

Terbukti ada beberapa kesan yang dimunculkan pasca kejadian Bela Islam tersebut diantaranya pengalihan *issue* Politik PILKADA DKI Jakarta hingga *issue* PILPRES 2019. Komentar yang bermacam-macam dari kalangan politikus yang menakuti kekuatan dan semangat umat Islam yang begitu luar biasa akhirnya menuaikan hasil dengan mulai membuat wacana tentang peraturan yang bersifat Konstitusional dengan membuat peraturan pendataan ulama atau sertifikasi Mubaligh.

Suasana semacam ini dinilai berdampak buruk bagi semua pemeluk Agama, karena dihindangi oleh rasa kebencian dan rasa kecurigaan yang amat mendalam. Hal inilah yang menurut hemat saya dinilai pemerintah ingin membedakan antara Agama dan Pemerintahan, seperti idealnya sebuah Negara atau pemerintahan yang bersifat Republik, berarti mau tidak mau menina-bobokan dulu konteks Agama atau mengesampingkan *issue* agama, karena dinilai bersifat sensitif bagi sebuah keutuhan Negara tersebut.

Negara kita yang menurut orang dinilai sebagai mayoritas Muslim terbanyak di dunia malah memegang teguh konsep Republik atas nama kemanusiaan dan kesatuan karena seperti halnya Negara, kita berasumsi bahwa Agama kemungkinan akan menjadi sebuah mata pedang yang memiliki dua ujung mata pedang; yang satu akan menghunus musuh dan yang satu lagi akan melukai si pemain pedang itu jika tidak pandai memainkannya. Maka pada Tahun 1945 negara kita tidak memilih menjadi Negara Islam walau menurut sebagian berpendapat jika mayoritas para pahlawan yang memperjuangkan NKRI

⁶⁷<http://kbbi.web.id/agama>, diunduh pada tanggal 16 Maret 2017, pukul 08.00 WIB

adalah dari kalangan Muslimin dan Muslimat.⁶⁸ Namun kenyataannya dalam proklamasi menyatakan jika Negara kita menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam arti lain, Negara kita memilih berhaluan Sekuler ketimbang mendirikan Negara berasaskan Agama. Pertimbangannya adalah jika kita berasaskan salah satu Agama, maka kemudian kita secara otomatis membuat sekat dengan Agama lainnya dan ini bisa berakibat fatal, yang mana kerukunan dan persatuan tidak akan pernah tercipta dan ketentraman negarapun mungkin akan terganggu, dan yang terjadi jika Negara terlalu mencampuri urusan Agama begitupun sebaliknya maka tidak heran satu sama lain akan saling intervensi dan saling bersebrangan.

Sekularisme dalam tubuh Pemerintahan

Sekuler, dalam kamus bahasa diartikan sebagai bersifat duniawi atau kebendaan (bukan bersifat keagamaan atau kerohanian).⁶⁹ Namun lain hal dengan Sekularisme. Segala sesuatu yang berimbuhan *Isme* pasti mau tidak mau akan mengartikan pemahaman jika itu adalah sebuah pemikiran.

Menurut salah satu pemikir besar dikalangan Asia Tenggara bahkan dunia, Muhammad Naquib al-Attas, mengungkapkan sekularisme adalah paham yang membebaskan manusia dari

kepahaman yang bersandarkan pada agama dan unsur-unsur keruhanian. Membebaskan perjalanan sejarah manusia dari campur tangan nasib, serta mendorong manusia kearah kepercayaan terhadap makna suatu proses perubahan sejarah, yakni perubahan dari peringkat kebudak-budakkan menuju kepada peringkat kedewasaan (*enlightenment*) dan kewarasan pikiran manusia, serta perubahan yang menuntut manusia harus mampu bersikap dewasa untuk memikul tanggung jawabnya sendiri tanpa harus bergantung kepada agama.⁷⁰ Jadi, jika kita kaitkan isu penistaan Agama yang melibatkan begitu banyaknya perspektif terselip pemahaman yang bersifat *fundamental*⁷¹ yakni pemahaman sekularisme. Alih-alih Negara berusaha mencoba dalam jalur yang netral, justru masyarakat berpandangan lain. Contohnya yang dikatakan dan diteriakan pada gelar aksi bela Islam III, dimana hasil dari perjuangan –perjuangan para pencari keadilan melalui hati nurani dibuat kecewa dengan kebijakan Negara yang selalu bersifat humanis dan *Jugde of law*.

Aksi bela Islam rupanya tidak berhenti di Aksi Bela Islam I. Aksi bela Islam berjenjang hingga yang terakhir Aksi Bela Islam V pada tanggal 21 Februari 2017.

⁷⁰Syed Naquib al-Attas, *Islam dan Sekularisme*, (Bandung: Pustaka, 1981)

⁷¹Disini arti fundamental dalam bahasa Filsafat adalah berpikir mendasar dan mengakar. Dalam hal ini, fundamental bukan disematkan kepada mereka yang berhaluan keras dan bertindak kasar, namun dalam pemahaman Filsafat, fundamental adalah sesuatu yang wajar ketika seorang manusia atau komunitas yang memiliki pola pikir yang mendasar dan mengakar hingga bisa dipertahankan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia : fundamental/fun:da:men:tal/ /fundamental/ a bersifat dasar (pokok); mendasar; iman, merupakan suatu hal yang sangat—didalam kehidupan manusia.

⁶⁸George McT. Kahin, *Menuju Masyarakat Egalitarian : Tentang Revolusi Kemerdekaan "Kumpulan Artikel Mencari Demokrasi, Institute Studi Arus Informasi, (PT Midas Surya Grafindo), 199.*

⁶⁹<http://kbbi.web.id/sekuler>, diunduh pada tanggal 16 Maret 2017, pukul 18.00 WIB

Pada akhirnya semangat Islam dan Jihad yang membara mesti terhempas dengan keputusan yang masih belum menjerat terpidana Basuki Tjahaja Purnama. Akan tetapi, Negara mendapat apresiasi yang begitu luar biasa karena cara Negara menyikapi aksi tersebut.

Aksi Bela Islam pada tanggal 14 Oktober 2016 adalah semangat panggilan jihad dan semangat keruhanian yang menggetarkan dunia dengan satu juta manusia yang turun ke jalan demi satu tujuan, yakni penjarakan Penista Agama. Negara seolah lebih melindungi satu orang dibanding mendengarkan jutaan umat Muslim yang menuntut.⁷² Inilah dia bukti jika agama tidak bisa mencampuri urusan Pemerintahan dan Hukum.

Namun sebelumnya, isu agama selalu kalah dengan *issue-isue* lainnya di negeri kita. Sekarang pasca terjadinya Aksi Bela Islam, isu agama dalam sebuah pergerakan kembali diperhitungkan seolah menenggelamkan stigma yang berpandangan agama sumber Teroris.

Negara dibuat terkapar. Hal ini terbukti, jika pada akhirnya Presiden sebagai kepala tertinggi di pemerintahan langsung melakukan safari ke setiap Ormas Islam dan para Tokoh Islam yang ada di Indonesia. Kendati demikian tetap saja tidak bisa disebutkan jika Negara kita mulai terbuka untuk mendengarkan jeritan kaum Muslimin. Yang ada malah dibuat seakan dikonflikkan antara satu pemahaman dan pemahaman yang lainnya, dari satu Ormas dengan Ormas yang lainnya hingga menjadi sebuah konflik yang dipelihara oleh

⁷²<http://www.voa-islam.com/topic/54/aksi-bela-islam-123/#sthash.NZrbSYCc.dpbs>, diunduh pada tanggal 16 Maret 2017, pukul 18.00 WIB.

Negara. Seperti halnya pasca Aksi Bela Islam, tidak sedikit tokoh Islam dianggap sebagai dalang makar dengan dalih agama. Maka yang terjadi adalah peng-Kriminalisasian para tokoh Ormas tersebut. Contoh saja dari Ormas FPI, dan berakhir bentrokan dengan Ormas yang ditenggarai oleh salah satu pejabat tinggi lembaga keamanan (Polisi).

Bentrokan ini terjadi setelah sidang penistaan lambang Negara Pancasila oleh satu Aktor besar Aksi Bela Islam Habib Rizieq Sihab.

Hal semacam ini memang tidak bisa dielakkan lagi di Negara kita, karena agama seolah dipisahkan dari Negara. Yang dipakai Negara adalah Agama sebagai simbol. Makanya tidak heran, nilai kesalehan dari para pemimpin dan pejabatnya tidak tercermin dalam mengolah dan mengatur tata kelola pemerintahan dan yang sangat bukti nyata adalah ketimpangan politik dan Ekonomi hingga melahirkan sebuah pemahaman ketidaksejahteraan masyarakat.

Menilik dari kasus ini, nilai demokrasi atau nilai kerakyatan seolah hilang ditelan bumi dan hangus di bakar kerakusan segelintir orang yang haus akan kekuasaan.

B. PEMBAHASAN

Demokrasi dalam Islam: Aksi Bela Islam

Dalam Agama nilai demokrasi sebenarnya tidak begitu diperhatikan, bahkan nilai demokrasidari beberapa Agama sengaja diharamkan karena berbeda dengan pemahaman awal. Contohnya di Islam. Islam sebagai agama yang penuh rahmat berpendapat jika Demokrasi adalah bukan cerminan Islam dan itu dibenarkan oleh ayat Qur'an :

“Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja disembah. Dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Maka putusan (sekarang ini) adalah pada Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S Ghafir 40:12)

“Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Q.S Yusuf [12]:40)

Sangat jelas di dalam Islam tidak pernah ada istilahnya demokrasi, namun demokrasi dalam Islam lebih bersifat musyawarah. Didalam al-Qur`an, kitab yang tidak diragukan lagi kebenarannya, musyawarah menjadi indikator terpenting yang menunjukkan kualitas keimanan pada suatu masyarakat serta menjadi karakter utama yang melekat pada semua komunitas yang mempersembahkan hidup mereka demi kejayaan agama Islam. Allah s.w.t. berfirman:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS al-Syûrâ 42: 38).

Sangat jelas Islam tidak pernah mengenal sistem demokrasi. Demokrasi

sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yang berasal dari dua suku kata: yakni Demos dan Kritos. Demos berarti Pemerintahan dan Kratos berarti Rakyat berarti sebuah kedaulatan pemerintahan berada di tangan Rakyat.⁷³

Maka secara tidak langsung kekuasaan tertinggi memang ditangan rakyat dan rakyat yang menentukan arah dan tujuan sebuah pemerintahan. Di Negara kita wujud demokrasi telah dilaksanakan sejak tahun 2000 an, bahkan sejak di didirikannya Negara dari tahun 1945 ini sudah mengalami beberapa perubahan pola demokrasi diantaranya:

1. Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945.⁷⁴

2. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Masa demokrasi terpimpin (1957-1965) dimulai dengan tumbangannya demokrasi parlementer atau demokrasi liberal yang ditandai pengunduran Ali Sastroamidjojo

⁷³Dr.K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Kanisius, 1999)

⁷⁴Suparman Marzuki, *Politik Hukum : Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 25.

sebagai perdana menteri. Namun begitu, penegasan pemberlakuan demokrasi terpimpin dimulai setelah dibubarkannya badan konstituante dan dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959.⁷⁵

3. Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Baru (1966-1998)

Dinamakan juga demokrasi pancasila. Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

4. Pelaksanaan Demokrasi Masa Transisi (1998-1999)

Masa transisi berlangsung tahun 1998-1999. Pada masa ini terjadi penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto yang mengundurkan diri kepada Wakil Presiden B. J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Jadi Presiden RI pada waktu itu digantikan oleh B. J. Habibie. Hal ini disebut masa transisi, yaitu perpindahan pemerintahan.

5. Demokrasi Masa Reformasi (1999-Sekarang)

Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan

perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga – lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu padaprinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR – MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Masa Reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:

- a) Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok Reformasi.
- b) Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referendum.
- c) Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN.
- d) Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI.
- e) Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV.

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.⁷⁶

⁷⁵ <http://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-1/ilmukewarganegaraan/perkembangandemokrasi-di-indonesia>, diunduh 16 Maret 2017.

⁷⁶Suparman Marzuki, *Politik Hukum : Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 55-68.

Dari kelima pemahaman demokrasi di Negara kita memang mengalami sebuah pergolakan yang begitu sempurna, namun secara penerapannya mungkin Negara kita seakan menjadi sebuah paham baru yakni Demokrasi Otoriter, yang mana Otoriter atau bersikap sewenang-wenang pemerintah mencerminkan Pemerintah anti rakyat.

Apabila dikaji dari segi Demokrasi ketika masyarakat turun kejalan pada Aksi Bela Islam itu adalah pertanda jika Masyarakat meminta kembali hak kedaulatan dan kebijakan kepada pemerintah yang berpahaman Demokrasi.

Aksi Bela Islam Merupakan Cerminan Modernism dalam Islam

Islam adalah salah satu agama yang terbuka untuk setiap perubahan tanpa merubah inti dari nilai keIslaman itu sendiri, modernism dalam Islam juga tidak diharamkan seperti halnya Sekulerisme dan Demokrasi.

Justru dalam Islam, Modernisme itu mesti terus dirawat. Aksi Bela Islam adalah hasil dari perkembangan dunia modern. Jika tidak ada pemahaman modernisme, mungkin tidak akan terjadi Aksi Bela Islam yang begitu dahsyat hingga menggerakkan jiwa masyarakat Islam.

Media Sosial adalah hasil dari modernisme dalam bidang teknologi. Namun bukan hanya itu, Islam juga mesti memiliki pola pikir yang modern juga, karena jika tidak memiliki pola pikir tersebut maka modernitas tidak akan pernah terjadi dan yang mungkin akan berkembang adalah ortodoks.⁷⁷

⁷⁷Ortodoks mengandung arti terbelakang.

Modernism dalam Islam tentunya bukan hal itu saja, melainkan sebuah Paham. Istilah “modern” berasal dari kata Latin *modernus* yang artinya “baru saja; *just now*”. Pengertian modern mengacu bukan hanya kepada “zaman” (kita mengenal pembagian zaman menjadi zaman purba, zaman pertengahan dan zaman modern). Tetapi yang lebih penting mengacu kepada “cara berpikir dan bertindak”. Peradaban modern ditandai oleh dua ciri utama, yaitu rasionalisasi (cara berfikir yang rasional) dan teknikalisis (cara bertindak yang teknikal). Tumbuhnya sains dan teknologi modern diikuti oleh berbagai inovasi di segenap bidang kehidupan. Berbicara modern selalu berkaitan dengan masalah ruang dan waktu. Sesuatu bisa saja dikatakan modern di tempat tertentu, namun belum tentu ditempat lain. Begitu pula sesuatu bisa dikatakan modern untuk waktu yang akan datang. Dan begitu seterusnya selalu membutuhkan sesuatu yang baru dari tradisi-tradisi yang lama. Bagi penulis, modern mempunyai makna yang relatif. Namun berbeda ketika berbicara modernisme dalam arti pemikiran, tentunya tidak bisa dilepaskan dari alam pikiran Barat, karena akar-akarnya berasal dari perkembangan ilmu filsafat serta ilmu pengetahuan dan teknologi dari Barat.

Pada awal abad 15-16 muncul gerakan *Renaissance*, yaitu gerakan menentang gereja yang dianggapnya telah membelenggu dan memasung kreatifitas berfikir manusia, yang pada gilirannya manusia menempati kedudukan sentral dengan kekuatan rasionalnya, dimana pada

masa ini Rene Descartes muncul sebagai tokoh utamanya.⁷⁸

Modernisasi secara implikatif, merupakan proses yang cenderung mengikis dan menghilangkan pola-pola lama dan kemudian memberinya pola-pola baru⁷⁹. Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam yang mempunyai nilai-nilai universal yang menyangkut semua manusia. Islam yang berarti sikap pasrah, kepatuhan dan ketundukan kepada Allah merupakan sikap umum yang dimiliki oleh setiap penganutnya. Islam sesuai dengan jiwanya selalu menerima perkembangan, karena al Qur'an itu sendiri merupakan wahyu Tuhan yang bersifat *universal* dan *up-to-date* memenuhi tuntutan perkembangan zaman. *Universalisme* Islam tergambar pada prinsip-prinsip nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan modern.⁸⁰

Berkaca pada Aksi Bela Islam, maka tidak heran inilah kebangkitan umat Muslim di Indonesia sebagai bentuk perubahan pola pikir umat Islam dalam menyikapi kesewenang-wenangan pemerintah. Dalam Aksi itu sebenarnya sarat muatan Modernisme, yakni masyarakat dan umat mulai bisa meraba dan memilah mana yang baik dan mana yang salah, menjadi semakin dewasa.

Namun bukan hanya sisi positif yang terjadi ketika modernism berkembang dan mencoba merebahkan sayapnya, sisi negatifnya adalah setelah terjadinya Aksi bela Islam tersebut mulai muncul yang disebut *HOAX.HOAX* adalah isu yang

dikembangkan lewat media massa online, atau berita yang belum tentu kebenarannya.

Masih banyak contoh di era sekarang ini bagaimana modernisme diterima oleh Islam dan dianggap sebagai salah satu *partner* dalam hal penyebaran ajaran di era Global, Pemakaian kata modern atau modernism, atau modernisasi selama ini sudah sangat populer dan semua kalangan intelektual Muslim maupun Non Muslim, sekalipun nampaknya sudah paham dengan peristilahan yang dimaksud. Ungkapan kata itu terkait dengan makna-makna tertentu yang bisa sama tapi bisa juga berbeda sesuai dengan aksentuasi masalah, tujuan dan asumsi peristilahan yang digunakan terutama dalam pengambilan istilah tersebut.

Sedangkan modern dalam peristilahan Arab dikenal dengan kata *Tajdid* yang artinya dalam bahasa Indonesia diartikan dengan pembaharuan. Dalam konteks pemikiran modern dalam Islam, ia merupakan suatu wacana yang mengawali perubahan mendasar bagi Islam sebagai suatu nilai ajaran dan umatnya sebagai pembuat arus perubahan tersebut. Tatkala mula pertama Islam lahir, untuk manusia telah berada di tepi jurang kehancuran karena tenggelam dalam lumpur keterbelakangan dan kebiadaban yang tak kenal moral, nilai dan kesopanan. Pelita perang dan petunjuk jalan kemana mereka harus melangkah, secara biadab mereka tinggalkan dan digantikan dengan kepercayaan dalam bentuk ritual yang dipalsukan oleh pemimpin kejahiliyahan yang haus akan kekuasaan. Disebutnya zaman kegelapan karena mereka tidak tahu perintah dan larangan, tidak tahu kompas sebagai pedoman, kemana harus

⁷⁸Lantip, *Paham-paham yang Menggoda Kehidupan Beragama*, (Surabaya: Fakultas Ushuluddin, 1990).

⁷⁹Pardoyo, *Sekularitas Dalam Polemik*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafit, 1993), 40.

⁸⁰Dr. Quraish Sihhab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 60.

melangkah, kemana tujuan harus berjalan kapan sampai dan harus berhenti.⁸¹

Sebenarnya, konsep modernism dalam Islam begitu lama dikumandangkan bahkan beberapa keterangan dan sumber menyatakan jika konsep modernism Islam adalah konsep *Pembaharuan*. Sebagaimana contoh dalam pemahaman pembaruan, bisa dilihat dengan apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah (728 H/1328 M.), selaku reformasi Salafisme yang menitikberatkan pada arti pengembalian orisinalitas pemahaman dan praktik Islam kepada kajian literal al-Qur'an dan Sunnah.⁸² Begitu juga Muhammad bin Abdul Wahab (1703 M), selaku pembaru di bidang keagamaan justru mengabaikan rasionalitas intelektual menurut kajian pengetahuan modern, meski gagasan pendobrakan terhadap *taklid*, *bid'ah* dan *khurafat* sangat revolusioner dikumandangkannya, dengan berpegang teguh pada al-Qur'an dan Sunnah.⁸³

Pada terminologi mutakhir, diperlukan kekayaan tematis agar bisa mengupayakan penunjang dari ide-ide modernism dalam Islam, termasuk didalamnya perlu iptek secara integral dan komprehensif yang tidak melupakan akar dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Selama ini IPTEK selalu dikesampingkan dalam peradaban Islam, mungkin karena disebabkan dampak dari sekularisme yang diatas kita bicarakan. Oleh karenanya

pembaruan yang muncul dalam studi-studi modernisme di negara-negara Islam di penghujung abad ke 18 dan awal abad ke 19 banyak memunculkan tema-tema sentral tentang perlunya iptek sebagai pemikat perluasan citra peradaban umat Islam menapaki abad-abad selanjutnya. Sehingga ada kecenderungan lebih semangat untuk proses Islamisasi sains, yang di Barat saat ini seakan sains bebas nilai dari keikutsertaan agama memberikan masukan positif di dalamnya.⁸⁴

C. SIMPULAN

Dikaji dari aspek Demokrasi dan Modernisme, aksi masyarakat turun ke jalan pada Aksi Bela Islam merupakan pertanda masyarakat meminta kembali hak kedaulatan dan kebijakan kepada pemerintah. Karena Islam merupakan agama yang terbuka untuk setiap perubahan tanpa merubah inti dari keIslaman itu sendiri, maka modernisme dalam Islam juga tidak diharamkan seperti halnya Sekularisme dan Demokrasi. Justru modernisme atau Tajdid itu dalam Islam harus terus dirawat. Aksi Bela Islam adalah hasil dari perkembangan dunia modern. Jika tidak ada pemahaman modern, maka tak mungkin lahir Aksi Bela Islam. Media Sosial adalah produk modernisme dalam bidang teknologi yang dimanfaatkan umat Islam untuk kemudian dikembangkan menjadi gerakan aksi. Dalam Aksi itu sebenarnya sarat muatan Modernisme, yakni masyarakat dan umat mulai bisa meraba dan memilah mana yang baik dan mana yang salah, menjadi semakin dewasa.

⁸¹Imam Munawwir, *Kebangkitan Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 21.

⁸²Lihat pandangan Nurcholis Madjid terhadap Ibnu Taimiyah yang dianggapnya termasuk pembaharu Islam kritis, *Dalam Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985),. 6.

⁸³Mendalami pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, maka dianjurkan membaca bukunya, *Kitab al-Tauhid*, (ITB Bandung: Pustaka Salman, 1985), yang secara sistematis mencirikan alur pemikiran beliau.

⁸⁴Abdul Sani, *Lintas Sejarah Perkembangan Modern Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 2

Tetapi pada sisi lain produk modernisme itu memiliki sisi negatifnya. Ketika setelah Aksi bela Islam itu kemudian pula muncul wacana dan isu yang kemudian disebut Hoax. Yaitu isu yang dikembangkan lewat media massa online yang tidak jelas kebenarannya. Dengan demikian umat Islam dituntut lebih cerdas lagi untuk memilah dan memilih informasi yang datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, Syed Naquib. *Islam dan Sekularisme*. Bandung: Pustaka, 1981.
- Bertens, Dr. K. *Sejarah Filsafat Yunani*. Kanisius, 1999
- bin Abdul Wahab, Muhammad. *Kitab al-Tauhid*. ITB Bandung: Pustaka Salman, 1985.
- Kahin, George McT. *Menuju Masyarakat Egalitarian : Tentang Revolusi Kemerdekaan "Kumpulan Artikel Mencari Demokrasi, Institute Studi Arus Informasi*. PT Midas Surya Grafindo.
- Lantip, *Paham-paham yang Menggoda Kehidupan Beragama*, Surabaya: Fakultas Ushuluddin, 1990.
- Madjid, Nurcholis. *Dalam Khazanah Intelektual Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Marzuki, Suparman, *Politik Hukum : Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- Mulyanto, Dede. *Bela Islam atau Bela Oligarki : Pertalian Agama, Politik dan Kapitalisme di Indonesia*. Pustaka Indoprogres, 2017.
- Munawwir, Imam. *Kebangkitan Islam*. Surabaya : Bina Ilmu, 1984.
- Pardoyo. *Sekularitas Dalam Polemik*, Jakarta: Pustaka Utama Grafit, 1993.
- Sani, Abdul. *Lintas Sejarah Perkembangan Modern Dalam Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sihhab, Dr. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.

Sumber Internet :

- <http://kbbi.web.id/agama>, diunduh pada tanggal 16 Maret 2017, pukul 08.00 WIB
- <http://kbbi.web.id/sekuler>, diunduh pada tanggal 16 Maret 2017, pukul 18.00 WIB
- <http://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture/ilmukewarganegaraan/perkembangandemo> kasi-di-indonesia, diunduh 16 Maret 2017.
- <http://www.voa-islam.com/topic/54/aksi-bela-islam-123/#sthash.NZrbSYCc.dpbs>, diunduh pada tanggal 16 Maret 2017, pukul 18.00 WIB.